



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG)
UNIT KERJA : KEDEPUTIAN BIDANG METEOROLOGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EKO PRASETYO
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK : 738906

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.350.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 12.250.000**

1. MOTOR, HONDA NF12A1CF MT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000
2. MOTOR, YAMAHA 2DP NON ABS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 23.500.000**

D. SURAT BERTAHAPAN **Rp. 1.500.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 226.703.877**

F. HARTA LAINNYA **Rp. 50.000.000**

Sub Total **Rp. 3.663.953.877**

III. HUTANG **Rp. 700.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 2.963.953.877**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.